Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 116-128

DOI:



Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Available online http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa

Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)

Analysis of The Performance of The Regional Inspectorate in The Supervision Function (Study at The Inspectorate of Langsa City)

Dilla Novita*1), Abdul Kadir²⁾ & Nina Siti Salmaniah Siregar²⁾

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area ²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tugas Pokok Inspektorat Kota Langsa adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Namun kenyataannya masih terdapat permasalahan yang terjadi di Inspektorat Kota Langsa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut makarumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana kinerja Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan di Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Tujuan penelitian untuk menganalisis Kinerja Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Metode Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian adalah (1) Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa dilihat dari aspek produktivitas, orientasi layanan, responsivitas dan akuntabilitas secara umum belum berjalan efektif, ternyata belum efektif. Sedangkan saran dari penelitian adalah Diperlukan adanya regulasi atau Undang-Undang yang mengatur mengenai pengawasan internal. . Diperlukan adanya komitmen dan kerja keras serta keseriusan dari aparatur pengawas yang ada di Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis sebagai pengawas Pemerintahan di daerah, maka sangat penting untuk meningkatkan efektivitas. Peningkatan etos kerja pemeriksa menjadi faktor penentu keberhasilan mekanisme organisasi.

Kata Kunci: Analisis, Fungsi Pengawasan, Inspektorat, Kinerja

Abstract

The main task of the Langsa City Inspectorate is to carry out oversight of the implementation of Government affairs in the region, and the implementation of guidance on the implementation of Regional Government. But in reality there are still problems that occur at the Langsa City Inspectorate. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in the study is What is the performance of the Inspectorate in carrying out the supervisory function at the Inspectorate in carrying out the supervisory function. Factors that influence the performance of the Inspectorate in carrying out the supervisory function. The research objective is to analyze the performance of the Inspectorate in carrying out the supervisory function. Factors that influence the performance of the Inspectorate in carrying out the supervisory function. The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation. The results of the study are The performance of the regional inspectorate in carrying out the supervisory function in Langsa City in terms of productivity, service orientation, responsiveness and accountability in general has not been effective, apparently not yet effective. While the suggestions from the research are Regulations or laws are needed which regulate internal supervision. There is a need for commitment and hard work and the seriousness of the supervisory apparatus in the Inspectorate in carrying out the supervisory function. As an institution that has a strategic role as supervisor of Government in the region, it is very important to increase effectiveness. Increasing the work ethic of examiners is a determining factor for the success of the organizational mechanism.

Keywords: Analysis, Inspectorate, Oversight function, Performance.

How to Cite: Novita, D., Kadir, A. & Siregar, N.S.S. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 116-128

*E-mail: dilla@amail.com



PENDAHULUAN

Kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders (Ritonga & Lubis, 2015). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi secara holistik antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihakpihak yang terkait, hal ini juga memudahkan institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa (Harahap & Angelia, 2016). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan (Haris & Heri 2016; Mujiburrahman, 2011; Siregar, 2011; Rizal, 2011). Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup Pemerintah Provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota.

Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Organisasi publik yang seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara negara (birokrat/PNS) sebagai tempat pelayanan bagi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi terkesampaingkan oleh kepentingan pribadi selaku penyelenggara negara (Deliana & Nasution, 2016). Kerangka filosofis sebagai konsideran menimbang Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan "bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kenyataan yang terjadi, organisasi publik lebih didominasi pada perilaku penyelenggarara yang berorintasi pada

hasil (materi) yang didapatkan dengan cara mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Organisasi publik yang dianggap memiliki tempat basah (banyak anggaran) cenderung menjadi incaran semua PNS. Implikasi berikutnya yang terjadi pada akhinrya bermuara pada orientasi kerja PNS yang memprioritaskan aspek keuangan dibandingkan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara. Keberadaan kinerja Manusia dalam melaksanakan pekerjaan di luar pekerjaan keuangan menjadi terkesampingkan. Rendahnya mutu pendidikan maupun kinerja para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan BP-PAUD dan DIKMAS Sumatera Utara, tidak semata-mata dipengaruhi faktor individu para Tenaga Pendidik dan Kependidikan itu sendiri (Rafiqah & Nasution, 2015).

Lebih dari itu, diantaranya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut, antara lain kinerja PNS di lingkungan BP-PAUD dan DIKMAS. Kinerja PNS di BP-PAUD dan DIKMAS belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Hal yang paling esensial dalam peningkatan kinerja pegawai adalah sejauh mana unjuk kerja pegawai tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan dibidang tugasnya, keterampilan kerja serta etika kerja, motivasi kerja dan disiplin. Pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta menambah wawasan dan pengalama nyang sangat berguna untuk melakukan kegiatan melaksanakan tugasnya. Melihat urgensinya kinerja dalam melaksanakan tugas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan ini perlu untuk dianalisis, maka penulis terdorong untuk mengangkat penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai di BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Model analisis yang di gunakan adalan William Dunn (2000) yaitu, memberikan definisi analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan variabel. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa. Serta untuk menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kota Langsa. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada Inspektorat Kota Langsayang beralamat di Matang Seulimeng, Langsa Baru, Kota Langsa, Aceh 24355. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimanakinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa.Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 – Maret 2019.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah, Inspektur, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan Kelompok Jabatan Fungional serta OPD sebanyak 3 orang. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data.Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Inspektur, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta OPD sebanyak 3 orangyang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa. Wawancara mendalam (depth interview). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, handphone, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Inspektorat Kota Langsa yang tercakup dalam

wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Inspektorat Kota Langsa. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nonnumerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalahanalisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Inspektorat Kota Langsa, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006). Menurut Miles dan Huberman (2010), teknik analisis data dengan model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Kredibilitas Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, analisis membandingkan dengan hasil penelitian, yaitu:Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciriciri dan unsur unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memuaskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu padatingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interprestasi untuk menarik kesimpulan (Kriyantono, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat diukur melalui empat indikator, sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto bahwa kinerja dari suatu organisasi dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut:

Produktivitas Inspektorat diukur melalui kemampuan mengidentifikasi masalah tugas pokok dan fungsi, mengetahui sebab-sebab tugas pokok dan fungsi belum

dilaksanakan sesuai ketentuan maka dalam hal ini tim pemeriksa Inspektorat memberikan rekomendasi berupa perbaikan atau pembagian tugas bagian-bagian dalam instansi yang diperiksa sesuai dengan tugas pokok bagian-bagian. Kepuasan kerja dalam hal ini kepuasan bagi instansi yang diperiksa dapat diperoleh karena Inspektorat memberikan solusi pemecahan masalah, yaitu mengembalikan tugas pokok dan fungsi bagian-bagian dalam organisasi obrik sesuai Peraturan Daerah sehingga personil dalam organisasi akan merasa puas dengan pemeriksaan aspek tugas pokok dan fungsi ini. Untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah maka ada (tiga) 3 program kerja dari Inspektorat Daerah Kota Langsa yaitu:Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Program peningkatan profesionalisme dan tenaga pemeriksa aparatur pengawas. Penataan dan penyempurnaan pengawasan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Berdasarkan dari tiga (3) program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan Inspektorat Daerah Kota Langsa dalam menunjang fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang ditemui dilapangan. Orientasi atau kualitas pelayanan yaitu tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kota Langsa untuk semua klasifikasi pekerjaan atau tugas yang diembannya. Kualitas Pelayanan Publik diukur dari tata cara dan prosedur pelayanan yang dilaksanakan secara sederhana serta terdapat kepastian dan kejelasan hukum, sehingga pelaksanaan pelayanan bisa dilakukan secara adil (tidak memihak) serta adanya transparansi dalam prosedur dan persyaratan serta biaya yang dibebankan kepada para pengguna jasa publik, yang meliputi prosedur dan tata cara pelayanan dan jaminan terhadap pengguna jasa publik. Kualitas pelayanan publik bisa dimulai dari tata cara dan prosedur pelayanan yang dilaksanakan oleh suatu unit pelayanan publik apakah tata cara dan prosedur pelayanan itu memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa publik dalam menyelesaikan berbagai urusan di unit-unit pelayanan dan prosedur yang ditempuh dirasakan tidak berbelit-belit.

Persyaratan yang diminta oleh aparat mengandung kejelasan dan kepastian serta biaya yang diminta sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat terhadap objek-objek yang akan di periksa akan berjalan dengan maksimal apabila didukung dengan kualitas layanan yang baik dari Inspektorat Daerah itu sendiri. Dari perspektif realitas di lapangan hasil penelitian dapat dijelaksan bahwa kualitas layanan dari Inspektorat Daerah Kota Langsa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada OPD yang menjadi objek pemeriksaan belum berjalan secara maksimal.Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan bahwa pelayanan yang diberikan belum optimal sehingga memunculkan adanya rasa ketidak puasan dan kekecewaan karena pelayanan yang diberikan belum sepenuh waktu. Kondisi ini juga disebabkan oleh keterbatasan dari aparatur pengawasan yang ada di Inspektorat Kota Langsa baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lebih jauh lagi dapat diketahui bahwa lingkungan pengawasan pada dasarnya dapat menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengawasan yang menitik beratkan pada

penerapan nilai-nilai good governance. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa lingkungan pengawasan merupakan landasan untuk semua komponen pengawasan internal yang membentuk disiplin dan struktur dari good governance. Pada sisi ini lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa lingkungan internal dalam organisasi inspektorat bergitu dinamis, kedinamisan tersebut nyatanya telah mempengaruhi bagaimana penerapan good governanceinspektorat dalam mengawasi OPD harus mencermati atau mempertimbangkan kondisi lingkungan. Hal ini penting guna tidak ada penguatan konflik ataupun kesalahan persepsi terhadap berbagai upaya dengan inspektorat dalam mengawasai sesuai nilai-nilai OPD governance.Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa pengawasan internal inspektorat di Inspektorat Kota Langsa begitu memperhatikan kondisi lingkungan dengan dikaitkan pada penerapan nilai-nilai good governance.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah menjadi kebutuhan sangat mendasar pada masa reformasi sekarang ini, sehingga kehadiran dari Inspektorat Daerah sebagai sebuah Institusi yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengenali dan merespon dengan baik setiap aspirasi dan kebutuhan serta keluhan dari masyarkat umumnya dan objek-objek yang diperiksa sehingga pelayanan secara cepat dan cermat menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah bertujuan untuk mengawal jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Langsa agar berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapakan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa substansi permasalahan yang telah dibahas menunjukan masih rendahnya tingkat responsivitas dari Inspektorat Kota Langsa dalam menyikapi setiap permasalahan atau keluhan yang ada. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hal ini menujukan bahwa kinerja dari Inspektorat Kota Langsa masih belum berjalan secara maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan.

Upaya untuk melakukan reformasi disegala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengharuskan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Selaras dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 589/IX/6/Y/99 yo No: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah Tingkat Eselon II ke atas, termasuk Inspektorat Kota Langsa wajib membuat Laporan Akuntabilitas. Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas pemerintah terhadap terwujudnya good governance di

Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan buruknya pengelolaan keuangan dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan transparasi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Semangat reformasi birokrasi telah membawah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas pemerintah menjadi hal yang penting untuk dipertanggung jawabkan oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap objek-objek yang diperiksa. Karena akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pengawasan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan dan secara otomatis akuntabilitas dari pelaksanaan tugas akan berdampak pada peningkatan tingkat kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Langsa agar dapat berjalan dengan efektif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan akan rendahnya tingkat akuntabilitas dari Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Langsa, karena dari berbagai masalah yang di laporkan belum semuanya diproses dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat, hal ini menjawab bahwa akuntabilitas dari Inspektorat Daerah di Kota Langsa dalam pelaksanaan tugas masih rendah. Diperlukan adanya sikap profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari Inspektorat sehingga mampu melaksanakan tugas dan berani mempertanggung jawab semua hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan untuk dipublish kemasyarakat sehingga ada kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat sehingga hal tersebut berimbas pada peningkatan kualitas kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 11 tentang Inspektorat melakukan terhadap penyelenggaraan pengawasan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta badan usaha milik daerah serta usaha lainnya. Perlu ditambahkan bahwa di dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Inspektorat di dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas fungsional, adapun faktor-faktor tersebut meliputi indepedensi, sumberdaya manusia aparat pengawas serta sarana dan prasarana penunjang. Independensi merupakan faktor utama yang membuat kinerja Inspektorat Daerah dapat berjalan secara efektif dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Independensi menjadi landasan atau dasar utama dalam efektifitas pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pada hakikatnya berbicara mengenai Independensi dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Independensi dari Inspektorat Kota Langsa dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan belum nampak dan belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan kedudukan dari Inspektorat Daerah itu masih dibawah tanggung jawab dari Kepala

Daerah seperti dapat dilihat dalam Oanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa, dan Peraturan Walikota Langsa No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Langsa, disebutkan bahwa Inspektorat Kota Langsa merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi pembinaan dari Sekretaris Daerah. Aturan diatas membuat Independensi dari Inspektorat Daerah menjadi lemah, karena Inspektorat itu diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Artinya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan secara efektif dan penilaian terhadap kinerja dari kepala daerah tidak dapat dilakukan secara objektif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik apabila didudukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan memadai yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang pengawasan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Kualitas sumber daya manusia yang handal akan menentukan keberhasilan dan kemajuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa dari 33 aparat yang ada ternyata ada 5 orang sebagai auditor madya, 13 orang sebagai auditor muda, 11 auditor pertama, 4 auditor pelaksana. Artinya hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan dari aparat pengawas yang ada di kantor Inspektorat kurang memadai, karena tidak semua aparat pengawas memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat menunjang dan mendukung kinerja dari Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat pengawas diatas memperlihatkan kondisi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah Kota Langsa selama ini belum berjalan secara maksimal, karena kualifikasi tingkat pendidikan dan struktur aparat pengawas di kantor Inspektorat yang masih minim dan belum memadai. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kota Langsa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kualitas aparatur pengawas serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting di dalam menunjang kualitas pelaksanaan pengawasan yang baik. Dari hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa didalam melakukan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, para aparatur Inspektorat Kota Langsa sudah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Kemudian dari hasil wawancara dengan sekretaris Inspektorat Kota Langsa Bapak Darma Putra, SP mengenai kelengkapan sarana dan prasarana dikantor Inspektorat Kota Langsa. Dari hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa ketersedian sarana dan prasarana pendukung dikantor Inspektorat Kota Langsa didalam melakukan pengawasan sudah ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukung misalnya saja alat tulis, komputer, dan lain sebagainya, meskipun masih ada kekurangan dan perlu untuk ditambahkan. Dalam penelitian ini pembahasan di fokuskan pada penilaian efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Langsa. Bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karenanya, dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dalam melakukan

penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kota Langsa. Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selama ini dilakukan sudah efektif, dengan alasan karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja Pemerintahan Daerah yang selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pemeriksaan yang sudah tepat waktu meskipun untuk daerah-daerah tertentu masih ada keterlambatan. Seperti didaerah kepulauan yang dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor cuaca yang seringkali tidak mendukung dan juga sarana pendukung seperti transportasi yang digunakan masih terbilang minim, sehingga waktu yang ditempuh tidak bisa diperkirakan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidak tepatan waktu yang ditempuh sehingga data yang ingin disampaikan untuk daerah kepulauan sehingga perlu diberikan solusi yang efektif sehingga dapat lebih meminimalisir lagi tingkat keterlambatan didadalam pengumpulan data-data. Kemudian jika dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian yang telah ditelusuri, sudah ditunjang dengan ketersedian data yang akurat dan dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut, selain itu pengujian yang telah dilaksanakan sudah transparan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada, hal ini ditunjang dengan keberhasilan Inspektorat Kota Langsa untuk kedua kalinya meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai wujud profesionalisme kerja Inspektorat Kota Langsa. Selanjutnya, dilihat dari segi efektivitas dalam pengusutan, dalam hal pengusutan dapat dilihat dari ketepatan waktu didalam melakukan penyelidikan dianggap sudah efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengusutan ini ditunjang dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman di dalam melakukan pengusutan sudah tepat waktu, sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat khusunya Inspektorat Kota Langsa ini ialah dari segi kualitas sumber daya manusianya sehingga berdampak pada kinerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan oleh Inspektorat Kota Langsa, ditengah kurangnya kuantitas para pengawas di kantor Inspektorat Kota Langsa tidak menurunkan kualitas pengawasan Inspektorat Kota Langsa. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat Kota Langsa ialah sarana dan prasarana penunjang, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam beberapa hal, tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Langsa. Akan tetapi terlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab para pengawasan yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan sudah menggambarkan keberhasilan dalam hal pengawasan karena jika lihat dari ketepatan waktu dan keakuratan data yang di laporkan sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Faktor penghambat, pertama masih tidak seimbangnya antara Aparat Pengawas atau Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat dengan objek pemeriksaan yang ada belum lagi ada tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor serta belum memiliki sertifikasi sebagai pengawas auditor pemerintahan. Kedua, anggaran pengawasan yang diberikan kepada Inspektorat dirasakan masih kurang yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang kurang maksimal. Faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Kota Langsa adalah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Langsa dapat dikatakan sudah lengkap, sangat mendukung ketiga fungsi pengawasan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional kantor kendaraan roda dua dan empat, perlengkapan kantor, komputer, laptop, printer dan lain-lain serta gedung sudah menunjang aktivitas pengawasan Inspektorat Kota Langsa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian maka kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsasebagai berikut: Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa dilihat dari aspek produktivitas, orientasi layanan, responsivitas dan akuntabilitas secara umum belum berjalan efektif, ternyata belum efektif. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota langsa adalah: Independensi Inspektorat masih bersifat subjektif, hal ini disebabkan kedudukan dari Inspektorat Daerah itu masih dibawah tanggung jawab dari Kepala Daerah yaitu Bupati. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur belum berkompetensi hal ini dapat ditinjau dari dari spesifikasi dan latar belakang pendidikan masih ada yang tidak sesuai dengan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, M. (2005), Menjadi Manajer yang Lebih Baik lagi. Terjemahan Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Arikunto, S. (2006), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Bogdan dan Taylor. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung.

Deliana & Nasution, I. (2016). Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medan Denai Kota Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (2): 152-161

Dwiyanto, A. (2002), Reformasi Birokrasi di Indonesia. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM.

Etzioni, A. (2002), Organisasi Modern. Terjemahan Suryatini, Universitas Indonesia, Jakarta.

Gibson. (2003), Perilaku Manajemen Organisasi. Erlangga: Surabaya.

Handoko, T.H. (2002), Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2, BPEE, Yogyakarta.

Harahap, A.S. & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4 (1): 29-42.

Haris, A., & Heri K., (2016), Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Administrasi Publik, 6 (1): 75-86.

Huda, N. (2007). Pengawasan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.FH UII PRESS. 2007.

Makmur, (2011). Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Rafika Aditama.

Mangkunegara, A.P., (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Manulang. M. (2011), Dasar-Dasar Managemen. Yogyakarta: Gajah Mada.

Martoyo, S. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga BPFE Yogyakarta. 2014.

Moleong J. L. (2004, Metodologi Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004.

Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 1 (2):160-169

Nanawi, H. (2004), Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga.

Nawawi, H. (2000), Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2000.

Rafiqah, M.O., & Nasution, I. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Mengajar Guru Sma Yayasan Perguruan Swasta Kesatria Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 126-132

Ritonga, A.H., & Lubis, A.A. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Herfinta Farm & Plant Kantor Cabang Medan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 112-125

Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 1 (2): 112-129

Siagian, S. P. (2000) Manajemen Stratejik. Bumi Aksara, Jakarta. 2000.

Simamora, H. (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta. 2005.

Singarimbun & Effendi. (2005). Penelitian Survai. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 2007.

Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 1 (1): 51-64

Steers M. R. (2010), Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku). Erlangga, Jakarta. 2010.

Sudarmanto. (2009), Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sudarso. (2010), Organisasi dan Metode. Karunika Universitas Terbuka Press, Jakarta. 2010.

Sugiyono. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Cetakan keempat. Penerbit: Alfabeta, Bandung.

Suharsimi, A. (2010), Manajemen Penelitian. Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Dl Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Langsa.

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Di Kelurahan Long Kali Kabupaten Paser)

Analisis Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta) http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2468/j.%20Jurnal.pdf?sequence=10&is Allowed=y.(di akses pada tanggal 10 Februari 2019. 15:45 WIB)

Analisis Kinerja Aparat Pengawas Interen Pemerintah (Apip) Dengan Menggunakan Bsc Pada Inspektorat Aceh. Jurnal Manajemen Volume 2, No. 1, November 2013 – 118. ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages pp. 118-127.

http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmm/images/Jurnal/vol.2/vol.2. no.1/11.118.127.Salman.pdf. (diakses pada tanggal 9 Februari 2019. 12:04 WIB)

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau.

https://core.ac.uk/download/pdf/77624679.pdf. (di akses pada tanggal 8 Februari 2019. 12:36 WIB)

Dilla Novita, Abdul Kadir & Nina Siti Salmaniah Siregar. Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam

Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 20, Nomor 2, November 2016 (175-188) ISSN 1410-4946.https://media.neliti.com/media/publications/101513-ID-peneguhan-reformasi-birokrasi-melalui-pe.pdf.(di akses pada tanggal 17 Februari 2019. 14:54 WIB)